
Fenomenologi Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Wangkanapi Kota Baubau Sulawesi Tenggara

Arman Jaya¹, Muh. Su'un², Darwis Lannai³

Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia Makassar

E-mail: armanjayamandaya@gmail.com¹, muhammad.suun@umi.ac.id², darwis.lannai@umi.ac.id³

Article History:

Received: 26 September 2024

Revised: 10 Oktober 2024

Accepted: 14 Oktober 2024

Keywords: *Accountability, BOS Funds, School Management, Minister of Education and Culture Regulations, Phenomenology.*

Abstract: *This research was conducted at SD Negeri Wangkanapi, Baubau City, Southeast Sulawesi Province, with the aim of exploring and understanding the experiences and perceptions of various stakeholders regarding the accountability of School Operational Assistance (BOS) funds in Indonesia. Using a phenomenological approach, this study reveals various dimensions and challenges in the implementation and supervision of BOS funds. The results show that BOS fund accountability is a complex phenomenon influenced by several key factors, such as the experiences of stakeholders, including school principals, treasurers, and operators who face challenges in preparing accurate and transparent reports, as well as systemic obstacles like limited human resources, lack of training, and complicated bureaucracy. Additionally, this study identifies best practices that can be applied to improve accountability, such as training for fund managers, streamlining reporting procedures, and utilizing technology to facilitate oversight. The study concludes that BOS fund accountability is crucial in maintaining transparency and school responsibility for the management of educational budgets. The implementation of Minister of Education Regulation No. 2 of 2022 serves as a guide for schools to allocate BOS funds effectively and efficiently, while collaboration between the Ministry of Education and other government agencies is necessary to monitor and evaluate fund usage to realize the nation's educational goals. Overall, the phenomenology of BOS fund accountability demonstrates that systematic and collaborative efforts can significantly improve the management and reporting of BOS funds, supporting the achievement of a better and more equitable education system.*

PENDAHULUAN

Penilaian terhadap kemandirian suatu negara dapat dilakukan berdasarkan kapasitasnya dalam mengelola dan membiayai pertumbuhannya sendiri. ([http: pasca-umi.ac.id/index.php/jasin](http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin)). Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Itu membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang bermakna dan inklusif untuk semua. Sehingga pemerintah disebuah negara harus menjamin dan mendukung pendidikan sebagai investasi terbesar dalam masa depan. Dengan membuka pintu pendidikan bagi setiap individu, maka pemerintah telah membuka pintu bagi kemungkinan tak terbatas dan perubahan yang positif dalam masyarakat. Mantan presiden Afrika Selatan "Nelson Mandela" berpandangan bahwa "pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia." pendapat ini menekankan kekuatan pendidikan dalam merubah banyak hal, tak hanya bisa merubah individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan pendidikan di indonesia telah melalui berbagai tahapan yang menggambarkan perjalanan panjang negara ini dalam upaya meningkatkan akses & kualitas. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan pendidikan sebagai salah satu upaya utama dalam membangun negara. Selama era orde lama dan orde baru, upaya untuk meningkatkan akses pendidikan terus dilakukan, program wajib belajar sembilan tahun (WBS) diperkenalkan pada tahun 1973 untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan dasar. Sejak reformasi pada tahun 1998, upaya untuk meningkatkan pendidikan oleh pemerintah terus berlanjut, pada bulan juni tahun 2015 melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun mulai diberlakukan. Upayah pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam dunia pendidikan semakin kuat, melalui program-program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperkenalkan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dalam akses pendidikan. Pemerintah juga mengadopsi berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti program peningkatan kualifikasi guru dan pembaharuan kurikulum.

Pemerintah Indonesia memiliki program yang disebut Dana BOS yang memberikan dana kepada sekolah-sekolah di seluruh negeri. Tujuan dari "pajak, yang merupakan pilar utama dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di Indonesia" selaras dengan persyaratan ini. ([http: pasca-umi.ac.id/index.php/jasin](http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin)). Berdasarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2022 pasal 23 ayat 1, tujuan dana tersebut adalah untuk membiayai operasional sekolah. Secara spesifik, dana tersebut dapat digunakan untuk: penerimaan peserta didik baru; pengembangan perpustakaan; penyelenggaraan kegiatan pembelajaran; pelaksanaan kegiatan evaluasi/penilaian pembelajaran ; dan penyelenggaraan kegiatan satuan pendidikan yang meliputi pembelian buku dan alat tulis, pembayaran listrik dan air, pembiayaan administrasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, perencanaan kegiatan, dan pembayaran honorarium. Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tersebut memuat pedoman pengelolaan dana BOS selain komponen keuangan.

Tujuan utama dari dana BOS adalah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan di indonesia. Melalui bantuan keuangan ini, diharapkan setiap sekolah dapat memperoleh sumber daya yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, meningkatkan partisipasi dan tingkat kelulusan siswa, serta mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah dan antar kelompok masyarakat.

Meskipun dana BOS bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di

seluruh Indonesia, alokasi dan distribusi dana BOS masih banyak memiliki kendala dalam proses penyalurannya, dikutip dari website resmi Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Dr. Sutanto, S.H., M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, menjelaskan bahwa pada tahun 2022 masih banyak satuan pendidikan yang belum memenuhi beberapa persyaratan sehingga dana BOS belum dapat disalurkan. Susanto juga memaparkan kendala yang dihadapi dan berdampak pada penyaluran dana BOS. Susanto mengklaim masih banyak laporan satuan pendidikan negeri terkait sisa dana tahun sebelumnya yang belum diverifikasi oleh APIP dan belum dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan.

Selain itu terdapat tantangan dalam pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana BOS yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Dari hasil wawancara dan hasil evaluasi dinas pendidikan kota Baubau pada tahun 2022 masih terdapat beberapa sekolah tidak menggunakan dana BOS berdasarkan prinsip-prinsip yang telah termuat dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022 pasal 2 yang memuat beberapa prinsip seperti fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau pemborosan.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti mengaitkan dengan jurnal yang ditulis oleh Nurafni I dkk, dengan judul penelitian "Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan" pada tahun 2021, dari hasil penelitiannya Nurafni I dkk mengungkapkan ada beberapa poin yang menjadi hasil dari penelitiannya tersebut. Kedua, akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS. Penelitian ini mengungkap akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan, yang meliputi pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. Perencanaan ini telah mengacu pada prinsip akuntabilitas namun belum melaksanakan hasil evaluasi diri sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Sesuai ketentuan penggunaan uang BOS reguler, sekolah telah memanfaatkan dana BOS reguler.

Komponen pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BOS menemukan bahwa bendahara BOS belum membuat buku administrasi pembukuan. Namun, SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan belum melengkapi buku pembantu kas maupun buku pembantu pajak berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Sebagai gantinya, pihak sekolah telah menyiapkan pembukuan berupa RKAS, buku kas umum, dan buku pembantu bank tahun 2021.

Pada tahun 2022, kementerian pendidikan dan kebudayaan, riset, dan teknologi merevisi Permendikbud nomor 6 tahun 2021 menjadi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Permendikbud nomor 2 tahun 2022 adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Didalam Permendikbud nomor 2 Tahun 2022 pasal 2 menjelaskan bahwa pengelolaan dana BOS berdasarkan pada prinsip Fleksibel, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparansi. Dengan menetapkan prosedur yang jelas dan ketat dalam penggunaan dana BOS, sekolah diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS, perlu adanya evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan dana,

diharapkan bahwa dana BOS dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas serta tinjauan teoritis yang mendukung hasil pemotretan fenomena yang peneliti amati diawal perlu kiranya dilakukan pengamatan lebih mendalam terkait *“Fenomenologi Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Berdasarkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 Di SD Negeri Wangkanapi Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara”*.

LANDASAN TEORI

Teori Fenomenologi

Kajian terhadap gagasan Edmund Husserl, orang yang dianggap sebagai bapak fenomenologi dan pencetus bidang tersebut. Husserl menyoroti perlunya mengkaji apa adanya untuk memahami fenomenologi. Oleh karena itu, untuk melihat peristiwa sebagaimana adanya atau melakukan prosedur "pengurangan", seseorang harus menyimpan atau mengisolasi sementara praduga, keyakinan, dan pengetahuan yang telah mereka miliki. Fokus utama teori fenomenologi adalah bagaimana individu memahami dan menginterpretasikan pengalaman subjektif mereka sendiri. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa narasi dan pengalaman pribadi lebih signifikan dan berwibawa daripada hipotesis penelitian (Morissan, 2013: 38).

Komunikasi

Memahami Pertukaran Verbal Kata Latin " Communis" (yang berarti membentuk atau membangun persatuan antara dua orang atau lebih) adalah asal kata "komunikasi". Menurut penjelasan Cherry dalam Stuart, kata "Communico" memiliki akar bahasa Latin dan berarti pemisahan. Rongers dan D. Lawrence Kincaid mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana dua orang atau lebih menghasilkan atau bertukar informasi untuk saling mengenal lebih dalam.

Akuntabilitas

Kata akuntabilitas dalam bahasa Inggris, yang berarti harus memberikan penjelasan atau menghadapi konsekuensi, adalah asal kata akuntabilitas. Setiap komponen yang memandu arah kegiatan bisnis sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing bertanggung jawab. Akuntabilitas didefinisikan oleh Wabster dan Waluyo (2007:190) sebagai kualitas yang bertanggung jawab, akuntabel, dan akuntabel. Pertama dan terutama, akuntabel berarti mampu menjawab kepada atasan, sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada Tuhan atas tindakan mereka. Kedua, akuntabilitas harus dapat diukur atau dipertanggungjawabkan, dan ketiga, akuntabilitas harus dipertanggungjawabkan secara tegas. Akuntabilitas didefinisikan dari sudut pandang akuntansi sebagai proses menghasilkan pengungkapan yang akurat.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk meningkatkan mutu pendidikan di masyarakatnya guna mendukung upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan negara. Salah satu inisiatif nyata pemerintah untuk meringankan beban biaya pendidikan publik adalah penyaluran dana BOS.

Sebuah inisiatif pemerintah yang disebut "Bantuan Operasional Sekolah" membantu satuan

pendidikan dasar dan menengah dalam hal biaya operasional nonpersonalia. Landasan inisiatif ini adalah Pasal 1 PP Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur tentang standar teknis BOS. Program ini memiliki tujuan, seperti program BOS yang sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015.

Tujuan umum program BOS adalah untuk meringankan beban keuangan masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Selain itu, inisiatif ini dimaksudkan untuk membantu lembaga pendidikan yang belum memenuhi persyaratan SPM dan SNP agar dapat segera memenuhi persyaratan SNP.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang peneliti pakai adalah menggunakan pendekatan deskriptif fenomenologi. Polkinghorne (Creswell, 1998) menyatakan bahwa studi fenomenologi menggunakan teknik fenomenologi untuk menjelaskan bagaimana pengalaman hidup suatu istilah atau fenomena memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Mereka yang bekerja dengan suatu fenomena menyelidiki struktur sadar dari pengalaman manusia. Pengalaman sadar seorang individu merupakan pusat perhatian tradisi fenomenologi. Menurut teori komunikasi, yang merupakan bagian dari tradisi fenomenologi, orang secara aktif menafsirkan pengalaman mereka untuk memperoleh pemahaman pribadi tentang lingkungan mereka.

Penelitian yang berdasarkan fenomenologi berasumsi bahwa setiap orang mengalami sesuatu secara menyeluruh. Dengan kata lain, tujuan penelitian fenomenologi adalah untuk menyelidiki partisipan yang kata lain terdalam tentang pengalaman mereka sepanjang suatu peristiwa. fenomenologi adalah memahami signifikansi suatu fenomena (2005).

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur atau dievaluasi secara langsung menggunakan angka (<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin>). Contoh data jenis ini adalah pengelolaan dana dan penerapan prinsip, yang berkaitan dengan unsur-unsur penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2022.

Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, wawancara, dan dokumen dengan pihak terkait, terutama yang bertanggung jawab atas pendanaan bantuan operasional sekolah.
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari membaca buku, jurnal, dan karya pustaka lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan peneliti memaparkan hasil wawancara dan observasi yang kemudian peneliti menyusunnya dan menjabarkannya agar mudah di pahami, khusus untuk sesi wawancara peneliti menggali pemahaman serta pemaknaan informan kunci dalam memaknai permendikbu sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mereflesi pemikiran dalam bentuk tindakan dan perbuatan dalam pengelolaan dana BOS dimana pemahaman dan pemaknaan informan terkait akuntabilitas pengelolaan dana BOS sebagai berikut:

1. Prinsip Fleksibilitas Pengelolaan dana BOS di SD Negeri Wangkanapi.

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2022 fleksibel adalah ketika sekolah mengalokasikan anggaran sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Pengelolaan dana BOS SD Negeri wangkanapi telah memenuhi asas fleksibilitas, hal ini dapat terlihat dari hasil

wawancara dengan kepala sekolah yang juga merupakan informan kunci dari peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam melakukan perencanaan dana bos kami menggunakan asas kebutuhan”. (Syalihin, S.Ag).

Pendapat yang disampaikan oleh kepala sekolah SD Negeri Wangkanapi senada juga dengan yang di ungkapkan oleh bendahara BOS dan Operator sekolah mereka mengatakan bahwa:

“Tentu, kami membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhan guru-guru namun terkadang juga ada barang-barang yang mubazir dan ada juga yang terlalu boros mereka pakai seperti kertas” (Irawati, S.Pd SD).

“Saya bertugas menginput perencanaan dana BOS, apa yang diberikan kepala sekola itu yang saya input” (Imran Ramadhan, A.Md COM).

Dari hasil wawancara diatas dapat di perkuat dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Negeri wangkanapi dimulai dengan tahap perencanaan yang melibatkan guru-guru serta pengurus komite sebagai perwakilan orang tua siswa untuk memberi masukan terkait hal-hal apa yang menjadi prioritas kebutuhan untuk dapat di realisasi dengan menggunakan anggaran dana bos.

2. Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan dana BOS di SD Negeri Wangkanapi.

Akuntabilitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas merupakan prasyarat akuntabilitas, menurut Wabster dan Waluyo (2007 : 190). Definisi akuntabilitas pertama-tama adalah kapasitas untuk menjawab kepada atasan. Ketiga, harus dapat diukur atau dipertanggungjawabkan, dan kedua, harus dapat dipertanggungjawabkan secara tegas. Akuntabilitas didefinisikan dari sudut pandang akuntansi sebagai proses menghasilkan pengungkapan yang akurat.

Berangkat dari pendapat di atas SD Negeri wangkanapi telah melaksanakan penggunaan dana BOS yang dapat dipertanggung jawabkan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan, SD Negeri wangkanapi dalam mengelola anggarannya sangat baik dari mulai melakukan perencanaan anggaran yang berdasarkan kebutuhan sekolah hal tersebut tergambar dari kertas kerja ARKAS dan juga arsip-arsip pelaporan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang dijadikan sampel peneliti. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang di ungkapkan oleh kepala sekolah SD Negeri wangkanapi bapak Syalihin, S.Ag.

“Untuk pelaporan saya kira sudah jelas terlihat, dari bukti kas dan BKU yang tiap bukan kami kerjakan dan kami laporkan ke dinas itu sangat mencerminkan kami menjalankan aturan yang ada”.

Disamping itu hal yang menarik adalah pak Syalihin jugah adalah tokoh agama yang sangat dihargai oleh masyarakat kota baubau hal tersebut terlihat dari banyaknya agenda beliau dalam mengisi ceramah-ceramah agama di masjid-masjid yang ada dikota baubau.

Pernyataan yang di sampaikan syalihin, S.Ag di pertegas oleh pendapat bendahara dan juga operator SD Negeri wangkanapi.

“Kami selalu melapor setiap bulan di dinas pendidikan”.

(Irawati, S.Pd SD).

“Kami selalu melapor setiap bulan di dinas pendidikan.

(Imran Ramadhan, A.Md COM).

Disamping hasil wawancara hasil observasi juga menggambarkan SD Negeri wangkanapi telah melakukan Akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS di sekolah, dari mulai pengerjaan buku kas umum (BKU), Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang

di setor ke dinas pendidikan kota, serta Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja. Dari beberapa hasil tersebut tergambar bahwa SD Negeri wangkanapi telah menjalankan prinsip Akuntabilitas dalam melakukan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS di sekolah.

Pemaknaan terkait akuntabilitas oleh kepala sekolah, bendahara dan juga operator yang merupakan tim manajemen BOS di sekolah juga dapat menggambarkan bahwa sekolah telah memiliki pemaknaan yang sesuai dengan makna yang terkandung di dalam permendikbud no 2 tahun 2022 dimana didalam permendikbud nomor 2 tahun 2022 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Prinsip Efisiensi Pengelolaan dana BOS di SD Negeri Wangkanapi.

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2022 efisiensi adalah pengelolaan dana BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Terkat dengan efisiensi pengelolaan dana BOS di SD Negeri wangkanapi masih perlu di tingkatkan, karena hal tersebut masih belum optimal diterapkan oleh sekolah, ini dapat terlihat dari hasil wawancara peneliti terkait masalah penerapan dan pemaknaan efisiensi di sekolah, kepala sekolah SD Negeri wangkanapi mengungkapkan:

“Kalau masalah efisiensi kami selalu berupaya untuk menerapkan itu namun terkadang situasi yang kadang tidak mendukung, contohnya saja mengenai sewa mobil pada saat anak-anak mengikuti lomba, kami mau melakukan penghematan dengan menggunakan taksi online tapi kalau taksi online itukan tidak bisa menunggu jadi solusinya kami menyewa saja mobil agar anak-anak dan orang tua siswa juga nyaman”(Syalihin, S.Ag).

Jawaban hasil wawancara tersebut tergambar bahwa masih ada kendala oleh pihak sekolah dalam penerapan efisiensi penggunaan dana BOS di sekolah.

Berkaitan dengan pendapat yang disampaikan oleh kepala sekolah, bendahara BOS dan operator sekolah juga mengungkapkan pemaknaan yang berkaitan dengan pendapat tersebut:

“Kalau masalah itu agak susah, kecuali kepala sekolah tegas boleh biar guru-guru itu tidak seenaknya menggunakan barang yang ada di sekolah, seperti kertas itu sering sekali habis bukan saya tidak mau beli tapi kadang mereka pakai terlalu boros”. (Irawati, S.Pd SD)

“Penghematan itu bendahara boleh, kami hanya kerja saja (Imran Ramadhan, A.Md COM)”.

Dari beberapa pendapat hasil wawancara diatas dapat terlihat bahwa untuk asas efisiensi sekolah belum maksimal dalam menerapkan hal tersebut sehingga ini dapat sangat mempengaruhi kualitas dan kerja laporan keuangan pada sekolah,

Secara teoritis, George Edwards dalam Setyorini (2010) berpendapat bahwa variabel-variabel berikut mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan:

1) Untuk menyampaikan keputusan kebijakan, komunikasi yang efektif merupakan kegiatan krusial dan prasyarat pertama bagi implementasi kebijakan.

Hal tersebut terlihat ada kesenjangan antara komunikasi kepala sekolah dan para guru yang mengakibatkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana BOS belum dapat dimaksimalkan oleh sekolah.

2) Sumber daya meliputi personel yang harus memenuhi persyaratan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pedoman untuk melaksanakan kebijakan, izin dari pemerintah untuk melaksanakan tugas, dan tanggung jawab di sekolah.

Berkaitan dengan sumber daya yang ada di sekolah, pihak sekolah harus memiliki tenaga ahli dibidang keuangan yang mampu memahami dan menterjemahkan arah kebijakan sehingga

implementasi terkait pengelolaan dana BOS lebih maksimal.

4. Prinsip Efektifitas Pengelolaan dana BOS di SD Negeri Wangkanapi.

Manajemen dana yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022 adalah pengelolaan dana yang bertujuan untuk menghasilkan keluaran (outcome), pengaruh (effort), dan daya guna (efficiency) dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri Wangkanapi:

“Saya rasa selama ini Dalam melaksanakan dana BOS hasilnya sudah sangat berdampak pada peserta didik khususnya pada penyelenggaraan pembelajaran siswa tidak pernah lagi melakukan pembelian buku, karena itu yang dilarang keras oleh aturan”. (Syalihin, S.Ag)

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh kepala sekolah SD Negeri wangkanapi pendapat yg juga senada dengan pendapat bendahara BOS dan operator terkait asas keefektifan dalam penggunaan anggaran, hasil wawancara menunjukkan bahwa:

“Sangat baik dampaknya, semua kegiatan kami adalah bersumber dari dana BOS” (Irawati, S.Pd SD)

“Yah, begitu lah sudah sesuai, kadang-kadang ada dampaknya sama siswa, mereka tidak lagi disuruh beli buku, banyak lomba-lomba juga di luar selalu mereka di belikan snack dan makanan”. (Imran Ramadhan, A.Md COM.

Dari hasil wawancara diatas ini diperkuat dari hasil yang peneliti temukan pada saat melakukan observasi di sekolah dan melihat langsung kondisi dan lingkungan sekolah yang kaitanya dengan prinsip efektifitas pengelolaan dana BOS disekolah, dari hasil observasi dapat terlihat beberapa penunjang pembelajaran yang didanai oleh dana BOS seperti, Fasilitas lapangan olahraga, peralatan penunjang pembelajaran, dan juga kegiatan eksternal dan kompetisi yang secara aktif selalu diikuti oleh sekolah dan dampak dari prestasi yang diberikan dapat terlihat dari anggaran tambahan yang diberikan kementerian pendidikan terhadap sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah Berprestasi. SD Negeri Wangkanapi memperoleh bantuan tersebut karena memiliki prestasi baik ditingkat daerah maupun nasional yang dikemas dalam anggaran dana BOS Kinerja Berprestasi.

5. Prinsip Transparansi Pengelolaan dana BOS di SD Negeri Wangkanapi.

Di dalam prinsip-prinsip yang termuat dalam permendikbud nomor 2 tahun 2022 salah satu yang paling menjadi focus dalam pengelolaan dana BOS disekolah adalah prinsip transparansi, menurut permendikbud nomor 2 tahun 2022 transparansi adalah pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

SD Negeri wangkanapi sudah menerapkan prinsip transparansi namun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri wangkanapi Syalihin, S.Ag beliau mengatakan bahwa :

“Kami selalu terbuka dalam penganggaran dana BOS, kami mengundang komite setiap rapat anggaran karena komite adalah perwakilan orang tua murid di sekolah” (Syalihin. S.Ag)

Dari pendapat kepala sekolah di atas, kemudian diperkuat oleh hasil wawancara dengan bendahara BOS terkait penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana BOS disekolah. beliau mengatakan bahwa:

“Kalau itu kami selalu mengajak komite perwakilan orang tua yang mengikuti rapat

perencanaan anggaran". (Irawati, S.Pd SD

Namun pendapat dari kepala sekolah dan bendahara tidak sejalan dengan pendapat dari hasil wawancara dengan operator sekolah, Imran Ramadhan selaku operator sekolah yang ada di SD Negeri wangkanapi mengatakan bahwa:

"Untuk transparansi masih kurang, ada hal-hal yang kepala sekolah putuskan tanpa melibatkan kami seperti di rapat terkadang ada hal-hal yang kami sampaikan tapi tidak dimasukan ke anggaran". (Imran Ramadhan, A.Md COM)

Dari beberapa hasil wawancara diatas terkait pemaknaan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang termuat didalam permendikbud nomor 2 tahun 2022 dalam hal ini asas transparansi masih terdapat kesenjangan,

Polkinghorne (Creswell, 1998) mengklaim bahwa studi fenomenologi mengeksplorasi struktur kesadaran pengalaman hidup manusia dan menjelaskan signifikansi pengalaman hidup bagi mereka yang terlibat dalam menghadapi suatu fenomena. Pengalaman sadar seorang individu merupakan pusat perhatian tradisi fenomenologi. Menurut teori komunikasi, yang merupakan bagian dari tradisi fenomenologi, orang secara aktif menafsirkan pengalaman mereka untuk memperoleh pemahaman pribadi tentang lingkungan mereka.

Berdasarkan pengalaman pengelola sekolah, dari landasan teori ini terlihat bahwa sekolah belum optimal dalam menganut prinsip transparansi dalam penanganan dana BOS di sekolah.

6. Komponen-Komponen Anggaran Dana BOS di SD Negeri Wangkanapi

Pengelolaan anggaran dana BOS telah dilaksanakan oleh SD Negeri Wangkanapi sesuai dengan komponen anggaran yang tercantum dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan utama penelitian, yang sesuai dengan Sugiyono (2018) yang menjelaskan bahwa informan atau narasumber merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif dan mampu menyampaikan informasi sesuai dengan keadaan dan kondisi latar belakang penelitian. Informan kunci merupakan mereka yang mampu memberikan penjelasan secara menyeluruh, mendalam, dan kaya akan informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data penelitian.

Hasil dari wawancara dengan Syalihin, S.Ag selaku kepala sekolah SD Negeri wangkanapi mengatakan bahwa :

"Untuk pengalokasian dana BOS kami merujuk pada juknis yang ada". (Syalihin.S.Ag)

Pendapat tersebut diatas senada dengan pendapat yang disampaikan oleh bendahara BOS dan operator sekolah, mereka mengatakan bahwa:

"Banyak komponen yang kami belanjakan seperti honor GTT/PTT, buku, atk, fotokopy, alat kebersihan semuanya kami menggunakan dana BOS". (Irawati, S.Pd SD)

"Kalau komponen atau jenis anggaran itu kepala sekolah yang atur saya tinggal memasukannya saja". (Imran Ramadhan)

Dari beberapa hasil wawancara diatas bahwa SD Negeri wangkanapi telah mengalokasikan anggaran dana BOS sesuai dengan komponen-komponen anggaran yang termuat dalam permendikbud nomor 2 tahun 2022 dimana ini dapat dilihat dari mulaipencanaan hingga realisasi anggaran yang telah termuat dalam pelaporan tahunan SD Negeri wangkanapi.

KESIMPULAN

Penelitian yang peneliti lakukan di SD Negeri Wangkanapi kota baubau provinsi Sulawesi tenggara dengan judul Fenomenologi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah di SD Negeri Wangkanapi Kota Baubau dengan harapan dapat mengeksplorasi dan memahami pengalaman serta persepsi berbagai pihak terkait akuntabilitas dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Indonesia. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini mengungkap berbagai dimensi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan pengawasan dana BOS.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi fenomenologi akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri Wangkanapi Kota Baubau, serta hasil dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dana BOS merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai factor:

1. Pengalaman Stakeholder: Para pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, bendahara, dan operator, memiliki pengalaman yang beragam mengenai akuntabilitas dana BOS. Kepala sekolah sering menghadapi tantangan dalam menyusun laporan yang akurat dan transparan, sementara bendahara dan operator menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak akan pelatihan dan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan dan pelaporan dana tersebut.
2. Kendala Sistem: Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala sistem yang mempengaruhi akuntabilitas dana BOS, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan birokrasi yang rumit. Hal ini sering kali mengakibatkan perbedaan dalam interpretasi dan pelaksanaan aturan yang mengatur penggunaan dana BOS.
3. Praktik Terbaik dan Solusi: Meski terdapat berbagai tantangan, penelitian ini juga menemukan praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dana BOS. Praktik tersebut mencakup peningkatan pelatihan bagi pengelola dana, penyederhanaan prosedur pelaporan, dan penggunaan teknologi untuk memudahkan proses pengawasan dan pelaporan.

Dari fenomena dan factor-faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan operasional sekolah adalah sebuah hal yang mutlak yang harus dipenuhi sekolah guna pertanggungjawaban sekolah terhadap pengelolaan anggaran, Negara melongtorkan dana yang begitu besar untuk kemajuan dunia pendidikan, permendikbud nomor 2 tahun 2022 hadir sebagai petunjuk teknis untuk mengarahkan penyelenggara anggaran dana BOS agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat didalam aturan tersebut, dengan adanya aturan yang jelas terkait pengelolaan dana BOS sekolah memiliki kompas dalam mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien sehingga sekolah dapat terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Negara yang unggul dalam dunia pendidikan dan mampu bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan. Kementrian pendidikan yang merupakan lembaga tertinggi dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia harus terus bersinergi dengan lembaga-lembaga Negara yang lain untuk terus berkolaborasi dalam hal monitoring dan evaluasi anggaran dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Implementasi permendikbud nomor 2 tahun 2022 dalam penyelenggaraan anggaran penggunaan dana BOS di SD Negeri Wangkanapi yang menjadi temuan peneliti adalah merupakan refleksi dari pemikiran dan hasil pemeknaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di sekolah.

Secara keseluruhan, fenomenologi akuntabilitas dana BOS menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya yang sistematis dan kolaboratif dapat membawa perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah di tahun-tahun yang akan datang. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan lokal, diharapkan akuntabilitas dana BOS dapat ditingkatkan demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan lebih adil.

DAFTAR REFERENSI

- Alifa, V. N. Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Putus Sekolah di Indonesia pada Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3(2), 175-182.
- Andriani, M. W. (2021). Studi Fenomenologi Motivasi Kebutuhan Penggunaan Tik-Tok Dalam Perkembangan Kematangan Sosial Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, 7(1), 34-42.
- Anggriyanti, D., Harahap, R. A. P., & Dalimunthe, B. (2018). Studi Fenomenologi: Pengalaman Perawat Dalam Mengupayakan Pencegahan Kesalahan Dengan Menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO). *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda*, 4(2), 145-149.
- Ali Nurdin, dkk, Pengantar Ilmu Komunikasi: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (Sidoarjo: CV Mitra Media Nusantara, 2013)
- Asqolani, A. (2022). Mengukur Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 59-80.
- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kecamatan mataram tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166-174.
- Aplikasi Rencana Kegiatan Sekolah (ARKAS) Tahun 2022
 Aplikasi Rencana Kegiatan Sekolah (ARKAS) Tahun 2023
- Barnett, B. G. (2005). Transferring learning from the classroom to the workplace: Challenges and implications for educational leadership preparation. *Educational Considerations*, 32(2), 3.
- Ekarani, D., Pujiningsih, S., & Ahmad, A. (2022). Studi fenomenologi: akuntansi dan perubahan sekolah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 55-64.
- Fauzan, F., & Setianingrum, N. (2023). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BOS DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Jember). *JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY*, 9(1).
- Fitri, A. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33-39.
- Gibson Burrell dan Gareth Morgan. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. (London : Heinemann Educational Book Ltd)
- Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Keempat, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019)
- Irmayanti, I., Rahim, S., & Sumarni, S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka). *jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis*, 20(1), 53-62.
- Khaninah, A. N., & Widjanarko, M. (2016). Perilaku agresif yang dialami korban kekerasan dalam pacaran. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 151-160.
- Lannai, D., & Junaid, A. (2023). Penerapan Peraturan Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) pada PT. Bumi Karsa-PT. Harfia Graha Perkasa, KSO Makassar. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 28-43. Website: <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin> This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/ATESTASI>
- Laporan Keuangan SD Negeri Wangkanapi Tahun 2021
 Laporan Keuangan SD Negeri Wangkanapi Tahun 2022

Laporan Keuangan SD Negeri Wangkanapi Tahun 2023

Mujib, A. (2015). Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 167-183.

Mubarok, H., & Attalina, S. N. C. (2022). Studi Fenomenologi Peran Guru Sekolah Dasar Sebagai Fasilitator dalam Pembelajaran Tematik di Kelas Tinggi. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(2), 75-87.

Mardianton, M., Suwita, H., Sumarni, I., & Efendi, F. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif. *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 14-33.

Nurkholida, E. (2018). Filsafat Pendidikan Menurut Perspektif Jawa (Studi Pemikiran Ki Hajar Dewantara). *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 393-407.

Purwanto, P. (2005). Menanggulangi Masalah Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 2(1), 17268.

Paradigma Interpretif Σ Mudjia Rahardjo | repository.uin-malang.ac.id/2438

Prayanthi, I., Maramis, J. B., Saerang, D. P. E., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Fenomenologi Makna Pengelolaan Keuangan Versi Keluarga Akademisi Akuntansi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2).

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021

Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022

Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023

Rismanda, A. S., & Subandoro, A. (2021). D. PENGELOLAAN-DANA-BANTUAN-OPERASIONAL-SEKOLAH-(BOS) PADA-SEKOLAH SWASTA. *Economics and Sustainable Development*, 6(1), 43-43.

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak "Asumsi Dasar Paradaigma Interpretif" Disampaikan pada Accounting Research Training Series ke-4 tanggal 26-27 Juni 2013 di Pascasarjana Akuntansi FEB Universitas Brawijaya.

Ramdhani, R. F. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 4(2), 95-104.

Suun, M., Tenriwaru, T., & Rahim, S. (2022). Merancang Sistem Informasi Akuntansi Dan Digitalisasi Laporan Keuangan untuk Pengelolaan Dana Desa. *Celebes Journal of Community Services*, 1(2), 44-50 <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/ATESTASI>

Su'un, S. U. (2021). Pengaruh Kompetensi, Fee Audit, dan Kecerdasan Spritual Terhadap Kualitas Audit. *SAIKO: Journal Of Management & Business*, 4(2), 34-47. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/ATESTASI>

Salmawati, Lannai, D., Junaid, A. (2023). Penerapan Peraturan Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) pada PT. Bumi Karsa - PT. Harfia Graha Perkasa, KSO Makassar. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Volume 1*, Nomor 1. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1272/1448> <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/ATESTASI>

Sunarya, I., Nurwahidin, M., & Sudjarwo, S. (2022). Pandangan Ki Hajar Dewantara dalam Mengkonstruksi Pendidikan Indonesia Pada Abad 21. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1485-1496.

Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14-32.

- Tampubolon, D. H. (2021). Perkembangan inovasi pendidikan di Indonesia.
- Ta'dung, Y. L., Pasulu, I., Kannapadang, D., & Marewa, J. B. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Pada SMA Katolik Rantepao, Toraja Utara. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 167-175.
- Wulandari, T. P. P., & Mubarak, H. (2020). Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(2), 84-96.